

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang resmi diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2001. Secara garis besar, diberlakukannya otonomi dan desentralisasi fiskal selain dalam rangka memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan daerah dengan cara memanfaatkan serta mengelola potensi yang ada sebagai sumber penerimaan daerah dalam menyangga penyelenggaraan pemerintahan, masing-masing daerah juga dituntut agar mandiri dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah agar mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik (Salampessy, 2011).

Konsekuensi dari diberlakukannya desentralisasi fiskal, yaitu pemerintah pusat harus memberikan dana transfer kepada Pemda untuk mengatasi adanya *fiscal gap* serta pemerataan kemampuan fiskal antar daerah karena karakteristik daerah di Indonesia yang berbeda, maka dibuat kebijakan transfer antar pemerintah (Rokhaniyah dan Nugroho, 2011). Salah satu yang termasuk dalam komponen dana perimbangan (dana transfer) yaitu dana alokasi umum (DAU) dimana peranannya sangat menonjol dibandingkan dengan komponen yang lain (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2008:22). Selain dana transfer, suatu daerah juga wajib mempunyai pendapatan yang menjadi sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Seperti menurut Rokhaniyah dan Nugroho (2011) PAD mempunyai peranan yang penting dalam keuangan daerah, karena PAD merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah, serta tanpa dana yang cukup maka ciri pokok dari otonomi daerah pun menjadi hilang.

Baik PAD maupun DAU, keduanya memiliki peranan yang besar dalam mendanai belanja daerah, yang pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Julitawati et al, 2012). Dimana PAD seharusnya menjadi sumber pendapatan yang dominan terhadap belanja daerah, sedangkan DAU hanya bersifat dana tambahan ataupun dana pelengkap jika terjadi

kekurangan bukan dijadikan sumber utama. Tetapi permasalahan yang terjadi saat ini, seperti menurut Ekawarna (2017) alokasi dana transfer pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam peningkatan PAD. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah akan berusaha agar DAU yang diberikan tetap dalam porsinya, bahkan menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Shah, 1994) dalam (Kuncoro, 2007). Untuk itu, tabel dibawah ini menggambarkan bagaimana proporsi PAD maupun DAU dalam membiayai belanja daerah, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia**  
**Tahun Anggaran 2015**  
**(Dalam ribuan rupiah)**

Provinsi	PAD	DAU	Belanja Daerah	Proporsi PAD	Proporsi DAU
Prov. Aceh	2.251.326.268	11.996.018.959	25.319.156.018	8,89%	47,38%
Prov. Sumatera Utara	3.865.753.656	19.527.737.839	35.559.762.963	10,87%	54,92%
Prov. Riau	2.136.892.446	5.787.472.140	24.000.250.289	8,90%	24,11%
Prov. Jambi	901.697.040	5.745.836.199	11.020.352.526	8,18%	52,14%
Prov. Bengkulu	410.900.498	4.800.836.000	7.854.421.974	5,23%	61,12%
Prov. Lampung	1.269.909.082	10.071.085.851	16.985.777.153	7,48%	59,29%
Prov. Bangka Belitung	612.815.425	3.037.087.304	5.806.432.069	10,55%	52,31%
Prov. Jawa Barat	16.405.686.257	30.559.260.103	70.345.741.245	23,32%	43,44%
Prov. Yogyakarta	1.911.224.967	4.079.454.240	8.630.824.796	22,14%	47,27%
Prov. Banten	6.287.250.608	7.011.460.604	18.899.184.526	33,27%	37,10%
Prov. Bali	5.377.762.613	5.249.585.922	14.189.147.618	37,90%	37,00%
Prov. Nusa Tenggara Barat	1.307.270.653	6.585.603.855	11.589.317.720	11,28%	56,82%
Prov. Kalimantan Timur	2.185.564.098	3.066.049.732	29.017.816.431	7,53%	10,57%
Prov. Sulawesi Utara	800.018.397	6.593.120.479	11.061.049.801	7,23%	59,61%
Prov. Gorontalo	390.262.653	2.731.435.413	4.639.478.314	8,41%	58,87%
Prov. Maluku	397.372.629	5.508.099.204	8.365.390.093	4,75%	65,84%
Prov. Papua Barat	463.801.620	6.137.647.552	12.780.522.441	3,63%	48,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas terlihat bagaimana gambaran umum mengenai belanja daerah yang dibiayai oleh PAD serta DAU. Terlihat bahwa Prov. Bali yang memiliki proporsi PAD tertinggi dalam mendanai belanja daerahnya yaitu sebesar 37,90% artinya cukup dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki walaupun selisih perbedaan antara PAD dan DAU hanya sedikit. Sedangkan Prov. Papua Barat yang memiliki proporsi PAD rendah yaitu sebesar 3,63% yang artinya belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dari tabel 1.1 juga dapat terlihat secara nasional, DAU masih dalam porsi yang dominan setiap tahunnya jika dibandingkan dengan porsi PAD (DJPK, 2014:13), dimana PAD hanya mampu mendanai Belanja daerah kurang dari 50%, bahkan masih ada yang di bawah 20%. Sejalan dengan hal itu, dimuat dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id), fakta mengatakan bahwa struktur anggaran pembangunan mayoritas kab/kota di Indonesia belum mandiri alias masih bergantung pada dana pusat. Kontribusi PAD dalam struktur anggaran daerah sangat kecil, sehingga di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah tersebut, transfer pusat menjadi sumber pembiayaan utama bagi terselenggaranya urusan-urusan pemerintah daerah. Maka dari itu, fenomena tersebut perlu dikaji karena jika dilihat dari potensi ekonomi maupun alam yang dimiliki tiap daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar, namun beberapa daerah saja yang masih belum dapat memanfaatkan serta mengoptimalkannya (DJPK, 2014:23).

Dengan adanya fakta serta data yang sudah dijabarkan, memperlihatkan bahwa Pemda diindikasikan melakukan perilaku menyimpang dalam merespon dana transfer dari pusat dalam mendanai pengeluarannya, atau yang biasa dikenal dengan sebutan fenomena *flypaper effect*. Dimana menurut Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat Pemda merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Fenomena dari *flypaper effect* tersebut, jika dilihat dalam kabupaten/kota di Indonesia tentunya bervariasi dalam artian bahwa terdapat kabupaten/kota yang terindikasi adanya inefisiensi dalam penggunaan belanja daerah, serta juga sebaliknya yaitu terdapat kabupaten/kota

yang terindikasi menggunakan belanja daerah dengan efisiensi (Armawaddin, 2015). Untuk itu, Kita dapat melihat adanya perbedaan antara daerah yang terindikasi dengan daerah yang tidak terindikasi melakukan *flypaper effect* dari besarnya DAU serta PAD terhadap belanja daerah tersebut. Karena perbedaan dari potensi PAD akan menghasilkan perbedaan penerimaannya yang selanjutnya akan menghasilkan perbedaan pula pada belanja daerahnya (Kuncoro, 2007). Berikut adalah tabel beberapa kabupaten/kota yang terindikasi melakukan serta tidak terindikasi melakukan *flypaper effect*:

**Tabel 1.2**  
**Kabupaten/Kota yang Terindikasi Melakukan dan Tidak Terindikasi Melakukan *Flypaper effect***

No	Kabupaten/Kota	DAU:BD	PAD:BD	Melakukan <i>Flypaper effect</i>	Tidak Melakukan <i>Flypaper Effect</i>
1.	Kab. Deli Serdang	51%	19%	✓	
2.	Kab. Bintan	33%	21%	✓	
3.	Kab. Bandung	40%	30%	✓	
4.	Kab. Magelang	57%	15%	✓	
5.	Kab. Malang	50%	19%	✓	
6.	Kab. Lombok Utara	55%	16%	✓	
7.	Kab. Sumbawa	62%	14%	✓	
8.	Kab. Raja Ampat	55%	4%	✓	
9.	Kota Banda Aceh	56%	22%	✓	
10.	Kota Cilegon	35%	40%		✓
11.	Kota Padang	55%	19%	✓	
12.	Kota Batam	22%	40%		✓
13.	Kota Tangerang	29%	47%		✓
14.	Kota Salatiga	59%	25%	✓	
15.	Kota Surabaya	18%	62%		✓
16.	Kota Jayapura	48%	11%	✓	

Sumber: Data diolah

Dalam tabel 1.2 tersebut terlihat bahwa kab/kota yang terindikasi melakukan *flypaper effect* dominan lebih banyak, dibandingkan dengan yang tidak terindikasi melakukan *flypaper effect*. Hal tersebut terjadi karena karakteristik daerah yang terindikasi dan yang tidak terindikasi melakukan *flypaper effect* berbeda. Seperti

yang sudah diketahui bahwa sumber daya yang terdapat pada tiap wilayah berbeda, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Ada daerah yang kaya akan sumber daya alamnya sehingga daerah tersebut dapat terhindar dari *flypaper effect*. Tetapi ada juga daerah dengan SDA yang melimpah tetapi tidak dapat mengoptimalkannya dan memilih untuk melakukan *flypaper effect*, dikarenakan SDM-nya yang masih lemah yang menyebabkan ketergantungan pada dana transfer. Untuk itu, *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah yang miskin akan potensi peningkatan PAD, namun juga yang kaya akan potensi peningkatan PAD (Kusumadewi dan Rahman, 2007). Selain dilihat dari segi sumber daya, bisa jadi dari sisi letak dan akses untuk datang ke daerah tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan dari daerah tersebut untuk melakukan *flypaper effect* atau tidak, seperti letak dari daerah tersebut yang sulit dan tidaknya untuk dijangkau.

Seperti yang terlihat, selain permasalahan mengenai fenomena *flypaper effect*, terdapat pula permasalahan mengenai kesalahan dalam penganggaran belanja daerah. Menurut Adi (2006) suatu daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Karena selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Mawarni et al, 2013). Senada dengan hal tersebut sudah seharusnya pendapatan yang diterima oleh tiap daerah digunakan untuk mendanai belanja yang nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat melalui program pemerintah, bukan untuk belanja yang tidak terkait secara langsung dalam program dan kegiatan pemerintah daerah. Karena berbagai belanja yang dialokasikan oleh pemerintah daerah hendaknya selalu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Adi, 2006), untuk itu sudah seharusnya pemerintah daerah mengubah komposisi belanjanya agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada publik (Mawarni et al, 2013). Berikut adalah tabel mengenai gambaran rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung pemerintah provinsi terhadap total belanja daerah, sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2015**  
**(Dalam ribuan rupiah)**

Provinsi	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja tidak langsung terhadap Total Belanja Daerah	Rasio Belanja langsung terhadap Total Belanja Daerah
Prov. Aceh	12.482.230.570	12.836.925.448	25.319.156.018	49%	50,70%
Prov.Sumatera Utara	19.323.713.917	16.236.049.046	35.559.762.963	54%	45,66%
Prov. Riau	10.816.221.523	13.184.028.766	24.000.250.289	45%	54,93%
Prov. Jambi	5.697.712.405	5.322.640.121	11.020.352.526	52%	48,30%
Prov. Bengkulu	4.170.584.026	3.683.837.948	7.854.421.974	53%	46,90%
Prov. Lampung	9.270.397.130	7.715.380.023	16.985.777.153	55%	45,42%
Prov.Bangka Belitung	2.640.970.775	3.165.461.294	5.806.432.069	45%	54,52%
Prov.Jawa Barat	37.862.072.582	32.483.668.663	70.345.741.245	54%	46,18%
Prov.Yogyakarta	5.050.558.631	3.580.266.165	8.630.824.796	59%	41,48%
Prov. Banten	8.257.580.955	10.641.603.571	18.899.184.526	44%	56,31%
Prov. Bali	8.637.940.756	5.551.206.862	14.189.147.618	61%	39,12%
Prov.Nusa Tenggara Barat	6.873.214.333	4.716.103.387	11.589.317.720	59%	40,69%
Prov.Kalimantan Timur	9.595.609.574	19.422.206.857	29.017.816.431	33%	66,93%
Prov.Sulawesi Utara	5.754.530.735	5.306.519.066	11.061.049.801	52%	47,97%
Prov. Gorontalo	2.481.017.497	2.158.460.817	4.639.478.314	53%	46,52%
Prov. Maluku	4.109.113.039	4.256.277.054	8.365.390.093	49%	50,88%
Prov.Papua Barat	4.243.544.227	8.536.978.214	12.780.522.441	33%	66,80%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Dari tabel 1.3 tersebut terlihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki rata-rata rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah yang terendah yaitu sebesar 39,15%, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki rata-rata rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah yang tertinggi yaitu sebesar 66,93%. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan belum ada yang mencapai rata-rata diatas 70%-80% yang menyatakan bahwa komposisi dalam penganggaran belanja daerah belum optimal. Karena, dalam Amrozi et al (2013) agar penyusunan APBD dapat optimal, efektif dan efisien, menurut Bambang Agus Salam (peneliti dari Asian Development Bank (ADB)), menyatakan bahwa belanja publik yang ideal yaitu 70% sampai dengan 80% dari APBD. Seperti yang dimuat dalam Bersatu.com, gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengharapkan

kontribusi belanja pemerintah yang lebih optimal dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2017, seperti belanja modal yang dapat memberikan dampak positif pada kinerja investasi dalam jangka panjang karena salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan investasi. Untuk itu, dimuat dalam Katadata.co., Joko Widodo menyatakan, penghematan bisa dilakukan dengan cara memangkas beberapa belanja pemerintah daerah, antara lain belanja perjalanan dinas, biaya makan dan minum dan biaya lainnya yang tidak terkait oleh pelayanan publik.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan (Mawarni et al, 2013). Pertumbuhan ekonomi merupakan output yang dihasilkan dari berbagai sektor yang dapat memberikan gambaran tentang kemajuan ataupun kemunduran yang telah dicapai dalam sektor ekonomi pada suatu periode tertentu (Yuliana,2014). Suatu daerah tidak akan berhasil apabila tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun PAD yang diterima meningkat, karena tingkat dari pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting dari pemerintah pusat maupun daerah (Maryati dan Endrawati, 2010). Berikut adalah tabel mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun yang berubah-ubah sebagaimana tergambar dalam tabel 1.4 menurut provinsi serta Indonesia secara keseluruhan.

**Tabel 1.4**  
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah**  
**Tahun 2012-2015**  
**(Persen)**

<b>Wilayah Pulau</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Sumatera	5,75	4,95	4,58	3,54
Jawa	6,37	6,01	5,57	5,45
Bali dan Nusa Tenggara	3,95	5,95	5,87	10,29
Kalimantan	5,72	3,95	3,29	1,31
Sulawesi	9,04	7,69	6,87	8,18
Maluku dan Papua	3,20	7,71	4,64	6,62
<b>Indonesia</b>	<b>6,03</b>	<b>5,58</b>	<b>5,02</b>	<b>4,79</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Seperti yang terlihat pada tabel 1.4 secara keseluruhan di Indonesia terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2015 dimana tiap tahunnya pertumbuhan ekonomi tersebut sedikit mengalami



perlambatan. Tetapi untuk tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,18%, sedangkan di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami sedikit penurunan lagi yaitu sebesar 5,01%. Seperti yang dimuat dalam *Kumparan.com*, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2017 sebesar 5,01%, sama seperti kuartal pertama 2017. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2016 yang sebesar 5,18 persen. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut melambat, di antaranya harga komoditas migas dan nonmigas yang mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya, seperti batu bara turun 1,87% dan palm oil turun 9,84%. Dalam *Kompas.com*, Ekonom dan pengajar senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) A Tony Prasetyantono menyebut, bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5% tersebut sebenarnya bukan angka yang baik bagi Indonesia. Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5% sebenarnya memang tidak jelek, tetapi bagi Indonesia angka pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa mencapai 6 hingga 7 persen.

Lain hal dilihat per wilayah, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan juga berdampak pada sebagian wilayah Indonesia, seperti pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Perlambatan yang paling signifikan terjadi di pulau Kalimantan, dimana tahun 2014 sebesar 3,29% turun menjadi 1,31% pada tahun 2015. Sementara untuk wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara merupakan wilayah yang paling tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yaitu sebesar 10,29% dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 5,87%. Sedangkan untuk wilayah Maluku dan Papua juga mengalami pertumbuhan dari 4,64% pada tahun 2014 menjadi 6,62% pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2016).

Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdillah dan Mursinto (2016) yang meneliti mengenai *the effects of financial balance transfer and regional own-source revenue on regional expenditure of regencies and municipalities in east java province*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk variabel eksogen yang diambil hanya PAD karena merupakan sumber penerimaan wajib dari kemampuan sendiri dan



DAU yang dimana dana transfer yang memiliki peran dominan dari komponen dana transfer yang lain. Selain itu untuk variabel endogennya terdapat penambahan yaitu pertumbuhan ekonomi. Sampel dalam penelitian ini mencakup kabupaten/kota seluruh Indonesia tidak hanya Provinsi Jawa Timur saja. Serta teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis jalur dengan (*Statistical Package for Social Sciences*) SPSS versi 23 dimana penelitian sebelumnya menggunakan model regresi data panel dengan *evIEWS* 7.

Selanjutnya penelitian ini juga mengacu kepada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Mawarni et al (2013) yang meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada kabupaten dan kota di Aceh). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan perbedaan dari pemerintah daerah yang terindikasi melakukan dan yang tidak terindikasi melakukan *flypaper effect* yang dapat dilihat dari DAU serta PAD terhadap belanja daerah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel endogen dalam penelitian ini tidak hanya belanja modal saja tetapi belanja daerah yang mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selain itu juga sampel dalam penelitian ini mencakup kabupaten/kota seluruh Indonesia tidak hanya kabupaten/kota Aceh.

Untuk itu berdasarkan uraian dari latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah yang berfluktuasi seperti penjelasan diatas maka kemungkinan besar terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di kabupaten dan kota di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik mencoba untuk melakukan penelitian kembali mengenai fenomena *flypaper effect* tersebut terhadap belanja daerah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketertarikan penulis dalam penelitian ini akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Perbedaan Pengaruh *Flypaper effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Indonesia”**

Febry Novianti Pertiwi, 2017

**PERBEDAAN PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah yang terindikasi melakukan *Flypaper effect* dengan yang tidak terindikasi melakukan *Flypaper effect*?
2. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah yang terindikasi melakukan *Flypaper effect* dengan yang tidak terindikasi melakukan *Flypaper effect*?
3. Apakah terdapat perbedaan besarnya pengaruh Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi antara Pemerintah Daerah yang terindikasi melakukan *Flypaper effect* dengan yang tidak terindikasi melakukan *Flypaper effect*?
4. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi antara pemerintah daerah yang terindikasi melakukan *Flypaper effect* dan pemerintah daerah yang tidak terindikasi melakukan *Flypaper effect*?

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.2.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya perbedaan pengaruh antara pemerintah daerah yang terindikasi melakukan *flypaper effect* dengan pemerintah yang tidak terindikasi melakukan *flypaper effect* yang dapat dilihat dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

### 1.2.2 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan besarnya pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah yang

terindikasi melakukan *Flypaper effect* dengan yang tidak terindikasi melakukan *Flypaper effect*.

2. Untuk menganalisis dan membuktikan besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah yang terindikasi melakukan *Flypaper effect* dengan yang tidak terindikasi melakukan *Flypaper effect*.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan besarnya pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi antara Pemerintah Daerah yang terindikasi melakukan *Flypaper effect* dengan yang tidak terindikasi melakukan *Flypaper effect*.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan apakah terdapat perbedaan pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi antara pemerintah daerah yang terindikasi melakukan *Flypaper effect* dan pemerintah daerah yang tidak terindikasi melakukan *Flypaper effect*.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat ataupun memiliki kontribusi yang dapat diberikan dari suatu hasil penelitian, baik dalam segi teori maupun segi praktisnya.

#### **1.3.1 Manfaat Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan secara teori dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik mengenai analisis fenomena *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi untuk Pemerintah daerah yang terindikasi melakukan *flypaper effect* dengan Pemerintah Daerah yang tidak terindikasi melakukan *flypaper effect*.

#### **1.3.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perbedaan pengaruh antara Pemerintah Daerah yang terindikasi melakukan

Febry Novianti Pertiwi, 2017

**PERBEDAAN PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*flypaper effect* dan tidak terindikasi melakukan *flypaper effect* yang dilihat dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, serta mengenai dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah, baik dalam hal meminimalisir terjadinya fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah dengan cara mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah guna untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, sehingga kemandirian daerah dapat ditingkatkan. Serta kebijakan dalam hal menentukan komposisi belanja daerah, agar tercapai pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat setempat.